



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 236 TAHUN 2022
TENTANG
DEWAN PELATIHAN KERJA NASIONAL TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan masukan, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan nasional bidang pelatihan kerja kepada Menteri Ketenagakerjaan, perlu membentuk Dewan Pelatihan Kerja Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Dewan Pelatihan Kerja Nasional Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG DEWAN PELATIHAN KERJA NASIONAL TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Dewan Pelatihan Kerja Nasional Tahun 2022 yang selanjutnya disebut DPKN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : DPKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk memberikan masukan, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan nasional bidang pelatihan kerja kepada Menteri, serta membantu Menteri mengoordinasikan lembaga pelatihan kerja nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, DPKN dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : DPKN bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam hal terjadi perubahan dan/atau penggantian anggota DPKN sebelum masa tugasnya berakhir, dapat dilakukan rapat pleno yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah anggota DPKN.
- KEENAM : Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan anggota pengganti antarwaktu.

- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 236 TAHUN 2022
TENTANG
DEWAN PELATIHAN KERJA NASIONAL TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DPKN

NO.	NAMA	JABATAN/UNSUR ORGANISASI	KEDUDUKAN
PEMBINA			
1.	Ida Fauziyah	Menteri Ketenagakerjaan	Pembina
PENGARAH			
2.	Anwar Sanusi	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan	Pengarah
3.	Budi Hartawan	Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan	Pengarah
4.	Caswiyono Rusydie Cakrawangsa	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Agung Nur Rohmad	Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Kementerian Ketenagakerjaan	Penanggung Jawab
2.	H. M. Moedjiman	Ketua Dewan Pakar Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia (APPRODI)	Ketua
3.	H. M. Bashori Imron	Praktisi Bidang Pelatihan	Wakil Ketua I
4.	Besar Setyoko	Praktisi Bidang Ketenagakerjaan	Wakil Ketua II
5.	Mahatmi Parwitasari Saronto	Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
6.	Dharendra Wardhana	Perencana Ahli Madya Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
7.	Saryadi	Plt. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN/UNSUR ORGANISASI	KEDUDUKAN
		Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
8.	Hery Budoyo	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
9.	Eva Trisiana	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
10.	Siti Kustiati	Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
11.	Sunardi Manampiar Sinaga	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
12.	Surya Lukita Warman	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
13.	Kunjung Masehat	Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
14.	Muhammad Yusuf	Kepala Pusat Pasar Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
15.	Mohammad Mustafa Sarinanto	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
16.	Fadjar Dwi Wishnuwardhani	Tenaga Ahli Utama Kedeputan III, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia	Anggota
17.	Bodro Pambuditomo	Tenaga Ahli Madya, Kedeputan III, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN/UNSUR ORGANISASI	KEDUDUKAN
18.	Cheka Virgowansyah	Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
19.	Yusup Adriyanto	Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI)	Anggota
20.	Dasep Suryanto	Ketua Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Anggota
21.	Mujiono	Tenaga Ahli Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian	Anggota
22.	Agung Purwanto	Ketua Program Studi Pendidikan dan Lingkungan Hidup, Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	Anggota
23.	Flora Aninditya	Peneliti Lembaga Demografi, Universitas Indonesia	Anggota
24.	H. Luluk Sumiarso	Ketua Umum Masyarakat Kompetensi Nasional (Maskomnas)	Anggota
25.	Yunus Triyonggo	Ketua <i>Steering Commite</i> Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK)	Anggota
26.	Baso Rukman Abdul Jihad	Dewan Pembina Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (LSPN)	Anggota
27.	Suhadi	Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK)	Anggota

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 236 TAHUN 2022
TENTANG
DEWAN PELATIHAN KERJA NASIONAL TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DPKN

NO.	NAMA	JABATAN/ UNSUR ORGANISASI	KEDUDUKAN
1.	Pendi	Koordinator Bidang Pengembangan Kemitraan dan Pendanaan, Kementerian Ketenagakerjaan	Ketua
2.	Muhamad Yusuf	Subkoordinator Bidang Pengembangan Pendanaan, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
3.	Eddy Siswanto	Subkoordinator Bidang Pengembangan Kemitraan, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
4.	Wisnu Yudo Nugroho	Penyusun Bahan Program Evaluasi dan Laporan, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
5.	Amirullah	Staf Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

